



PAPARAN
MENTERI DALAM NEGERI RI
PADA
KOORDINASI TEKNIS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
REGIONAL II TAHUN 2020



Oleh:
Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph. D

Bandung, 10 Maret 2020



CURRICULUM VITAE



Dr. HADI PRABOWO, MM SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

RIWAYAT JABATAN LAIN

- KOMISARIS PT. JAKARTA PROPERTINDO (PERSERO) PROVINSI DKI JAKARTA (2019-SEKARANG)
- KOMISARIS UTAMA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (2009-2013)
- KOMISARIS UTAMA PT. SARANA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH (2007-2011)
- KOMISARIS PT. SARANA PATRA HULU CEPU (2006-2009)
- KOMISARIS II PT. SARANA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH (2006-2007)
- DIREKTUR PT. SARANA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH (2005-2006)

TANDA JASA/PENGHARGAAN

- SATYA LENCANA KARYA SATYA X TAHUN (2015)
- SATYA LENCANA PEMBANGUNAN BIDANG KOPERASI (2012)
- SATYA LENCANA KARYA SATYA XX TAHUN (2006)
- SATYA LENCANA KARYA SATYA X TAHUN (2003)

RIWAYAT JABATAN

- Plt. REKTOR IPDN (19 OKTOBER 2019-SEKARANG)
- Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN (2018)
- SEKRETARIS JENDERAL KEMENDAGRI (27 FEBRUARI 2018-SEKARANG)
- Plt. SEKRETARIS JENDERAL KEMENDAGRI (2017)
- SEKRETARIS BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (2017-2018)
- Plt. SEKRETARIS BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN (2016)
- Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH (2015-2016)
- DEPUTI I BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (2014-2016)
- STAF AHLI MENTERI BIDANG SDM & KEPENDUDUKAN KEMENDAGRI (2014)
- SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (2008-2013)
- ASISTEN ADMINISTRASI SETPROV JAWA TENGAH (2005-2008)
- KEPALA BIRO KEUANGAN SETPROV JAWA TENGAH (2000-2005)
- KEPALA BAGIAN ANGGARAN BIRO KEUANGAN SETPROV JATENG (1996-2000)
- KASUBBAG PERKOTAAN BIRO BANGDA SETPROV JATENG (1994-1996)
- KASUBBAG SOSIAL BUDAYA BIRO BANGDA SETPROV JATENG (1988-1994)



*“Strategic Planning is
Worthless, Unless There is
First a Strategic Vision”*

-John Naisbitt-





PENDAHULUAN

***“Hampir semua persoalan
menyangkut daerah apalagi
otonomi daerah.***

***Betul, bahwa otonomi daerah
memberikan keleluasaan bagi
pemimpin daerah untuk
membuat program kerja masing-
masing. Namun sebagai suatu
sistem kenegaraan dan sistem
pemerintahan maka pemerintah
daerah juga harus
mengakomodir rencana
pemerintah pusat yang dipimpin
oleh Presiden”***



***“Dalam program kerja dan
anggaran yang saat ini sedang
berlangsung di daerah, diharapkan
visi misi presiden kemudian
diterjemahkan oleh para menteri
dan dapat disampaikan kepada
Pemerintah Daerah. Sehingga
dapat masuk dalam program kerja
daerah”***

**Menteri Dalam Negeri,
Prof. HM. Tito Karnavian Ph.D**

**Rakornas Indonesia Maju dan Forkopimda Tahun 2019
-13 November 2019-**





**Pencapaian visi 2045
melalui transformasi
ekonomi yang harus
didukung oleh
industrialisasi dengan
memanfaatkan sumber
daya manusia,
infrastruktur,
penyederhanaan
regulasi dan birokrasi**



5 Arahan Utama Presiden

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 | Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan *omnibus law*. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Kementerian Dalam Negeri berperan mendorong pemerintah daerah mendukung fokus kerja pemerintah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



URGENSI RAKORTEKREN BANG DALAM SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN DAERAH



DASAR PELAKSANAAN RAKORTEKRENBANG



Ps. 258
UU
23/2014

- **Pembangunan Daerah** merupakan **perwujudan** dari **pelaksanaan Urusan Pemerintahan** yang **telah diserahkan** ke **Daerah** sebagai **bagian integral** dari **pembangunan nasional**.
- K/L melakukan **sinkronisasi** dan **harmonisasi** dengan **Daerah** untuk **mencapai target pembangunan nasional**.

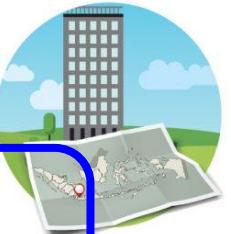
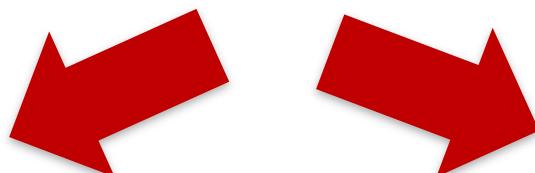
*Pencapaian target nasional tidak hanya dari
Pem. Pusat, tetapi juga oleh Pemda sesuai
dgn kewenangannya*



K/L melakukan koordinasi teknis yang dikoordinasikan oleh Kemendagri dan Kementerian PPN/Bappenas

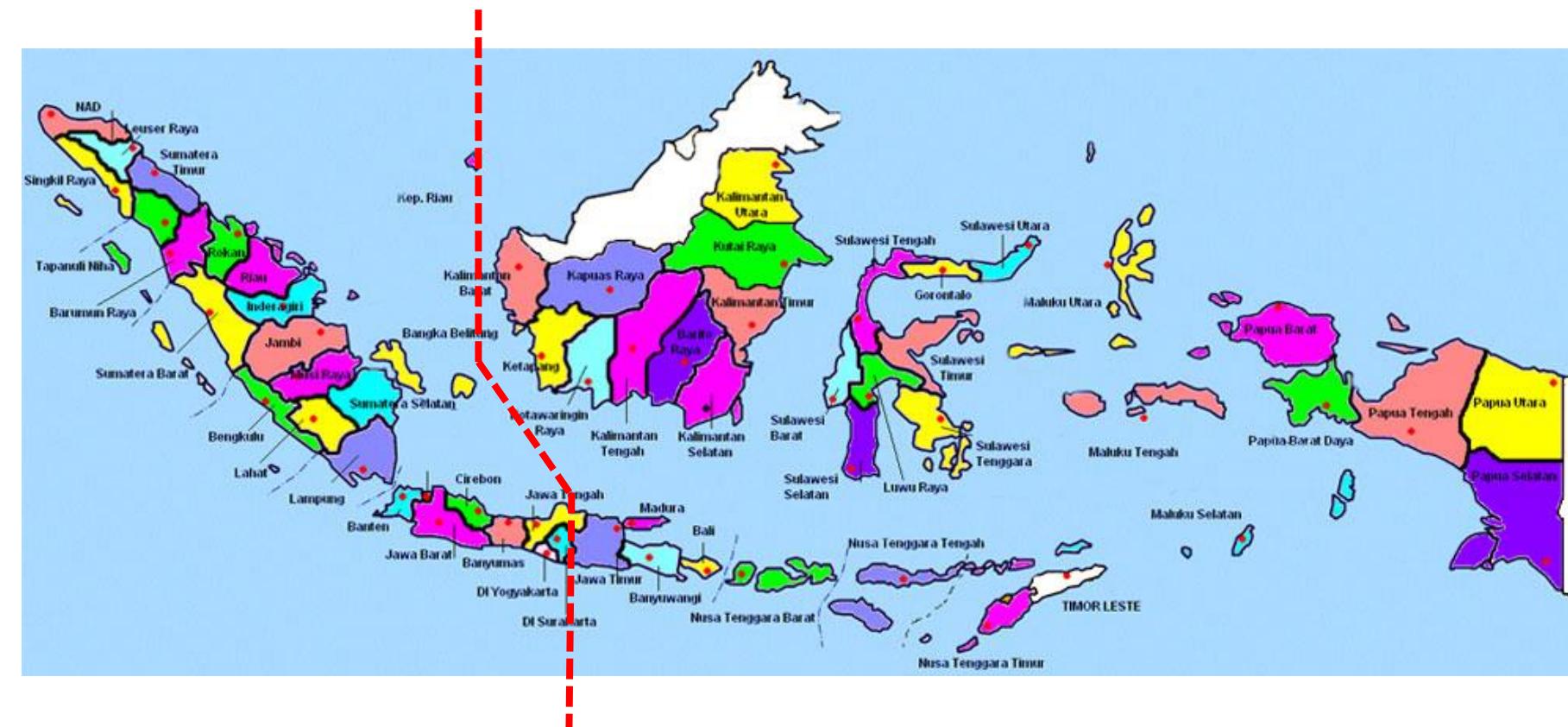


Kemendagri Pembinaan dan Pengawasan umum



K/L melakukan pembinaan dan pengawasan teknis

RAKORTEKREN BANG REGIONAL 2



Pemerintah Pusat :

1. Kementerian Dalam Negeri
 2. Kementerian PPN/Bappenas
 3. Kementerian Keuangan
 4. Kementerian/Lembaga

Pembahasan dilakukan dalam Desk Urusan dan Desk Kewilayahannya

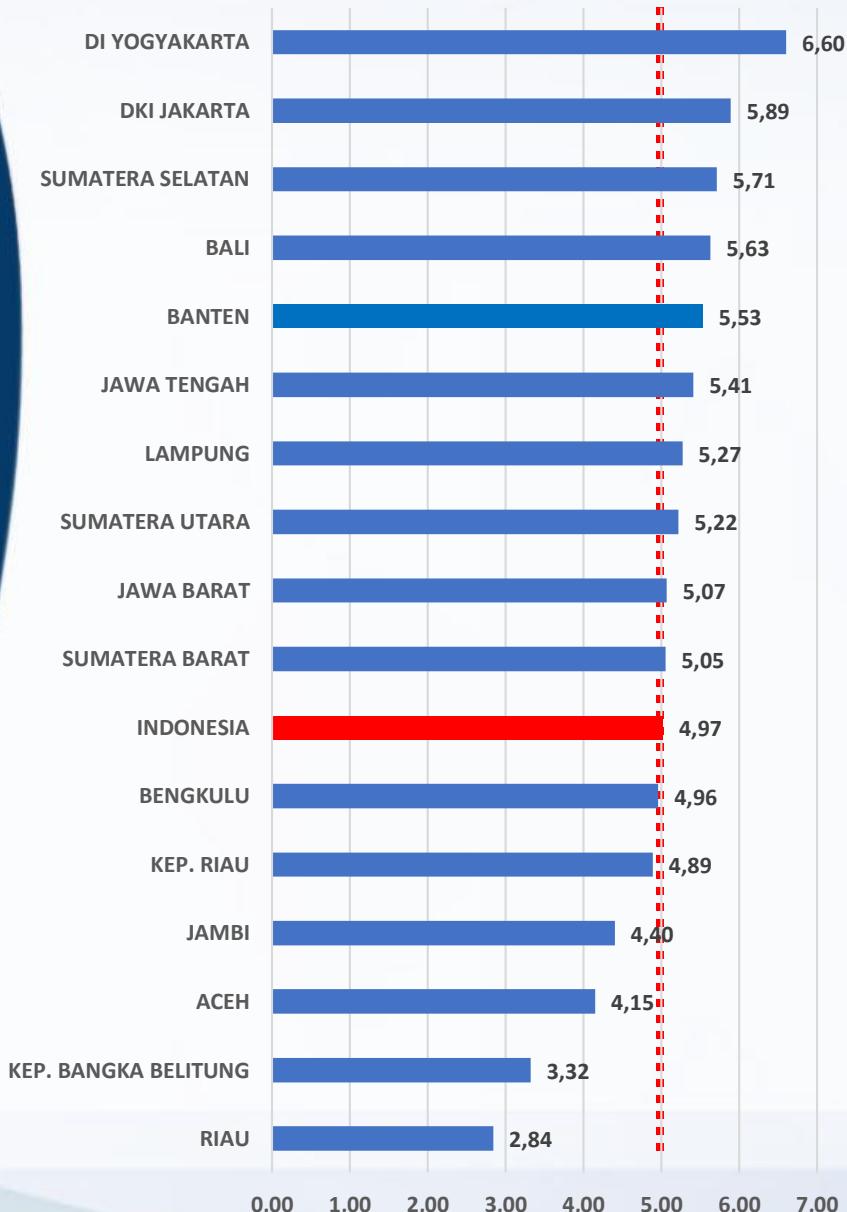
Pemerintah Daerah :

1. Aceh
 2. Sumatera Utara
 3. Sumatera Barat
 4. Riau
 5. Kepulauan Riau
 6. Jambi
 7. Bengkulu
 8. Sumatera Selatan
 9. Bangka Belitung
 10. Lampung
 11. DKI Jakarta
 12. Jawa Barat
 13. Banten
 14. Jawa Tengah
 15. DI Yogyakarta
 16. Bali



KONDISI CAPAIAN PEMBANGUNAN INDIKATOR MAKRO DI REGIONAL BARAT TAHUN 2019

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL 2 TAHUN 2019



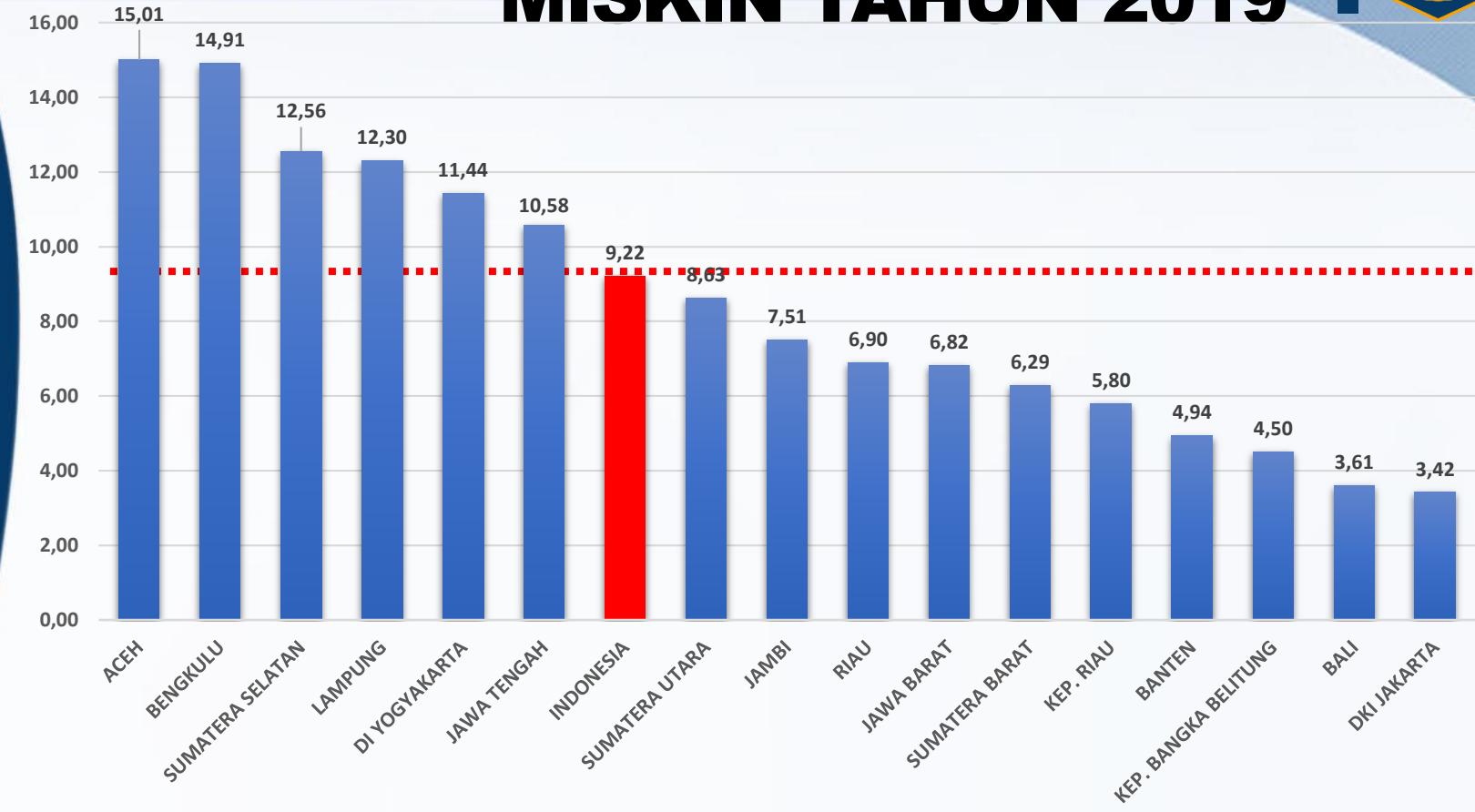
3 Provinsi dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi **tertinggi** :

1. DI Yogyakarta
2. DKI Jakarta
3. Sumatera Selatan

Untuk Provinsi **Riau** dan **Bangka Belitung** berada pada 2 posisi terendah di Regional 2 dan **membutuhkan langkah-langkah strategis** untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



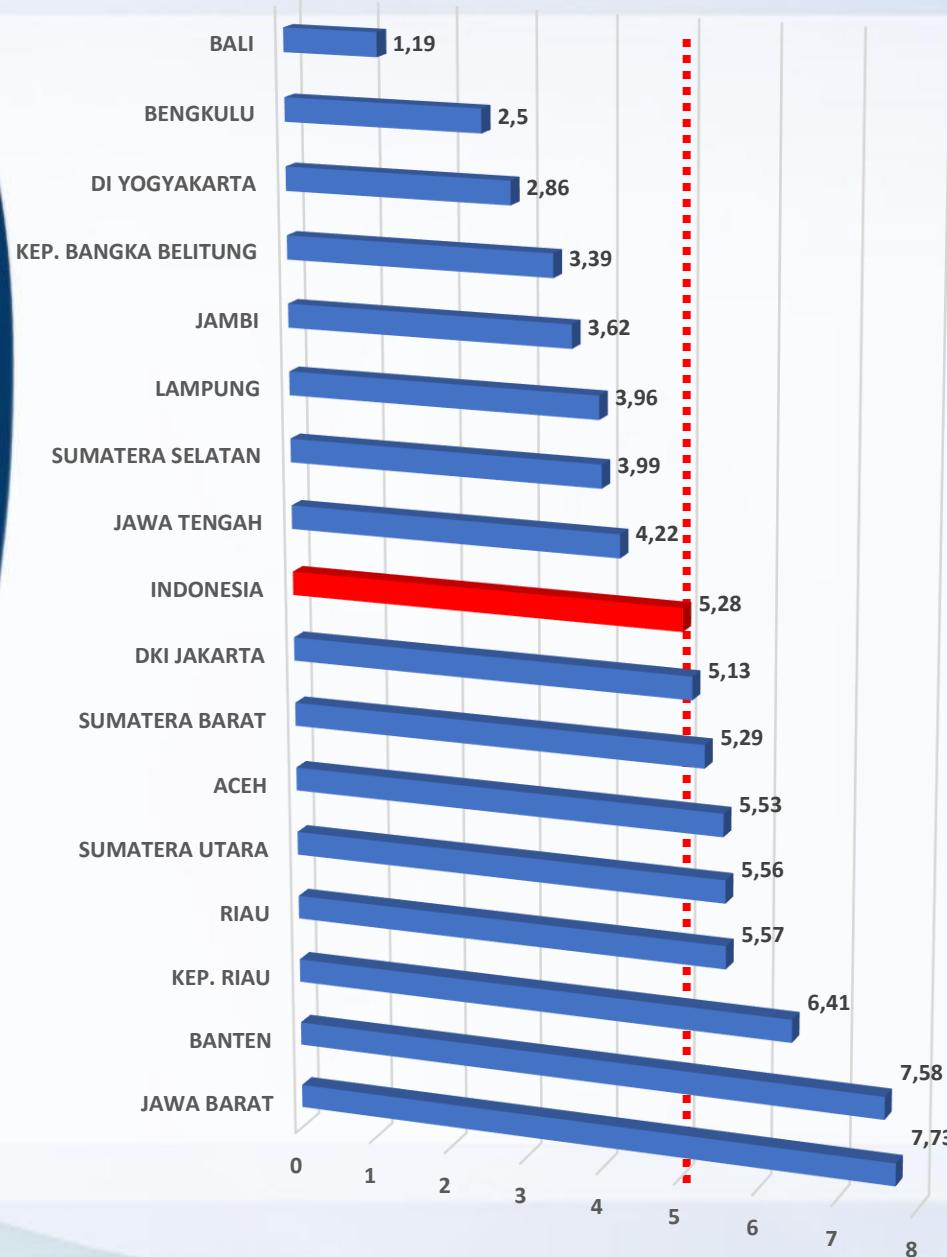
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TAHUN 2019



Tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya dinilai dari persentase penduduk miskin. Untuk provinsi yang masih berada di bawah rata-rata nasional, diperlukan sinergitas nyata antar sektor dalam penanganan kemiskinan.

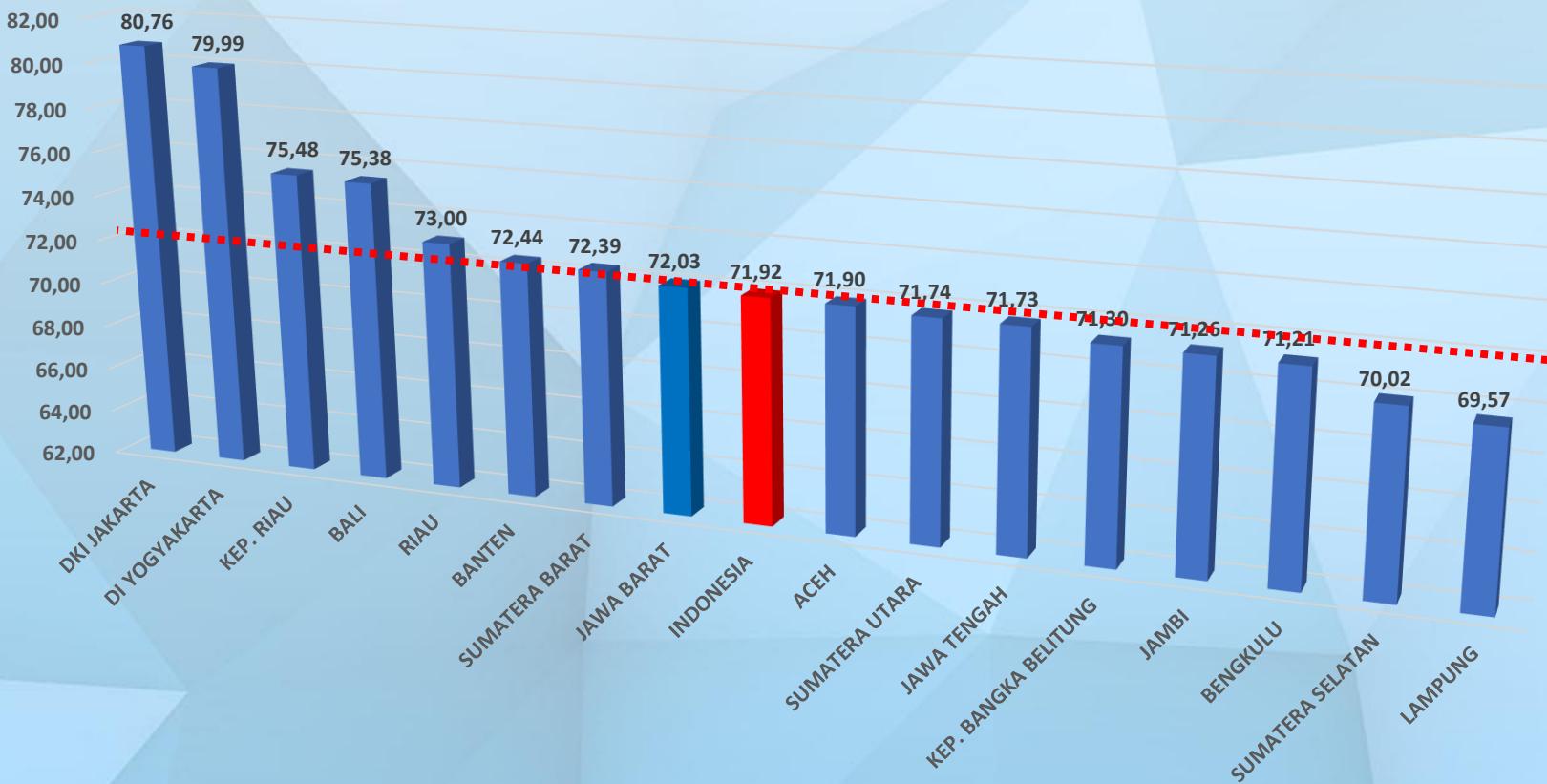
SUMBER: BPS 2020, DIOLAH

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PER FEB 2019



TPT merupakan **unsur** yang harus diperhatikan untuk **mengurangi angka kemiskinan** dan **kesenjangan** di masyarakat. Untuk **Bali** pada prinsipnya sudah **sangat baik** karena sudah **di bawah 2%**. Namun, **Banten** dan **Jawa Barat** perlu perhatian khusus karena masih **di atas 7%**.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2019

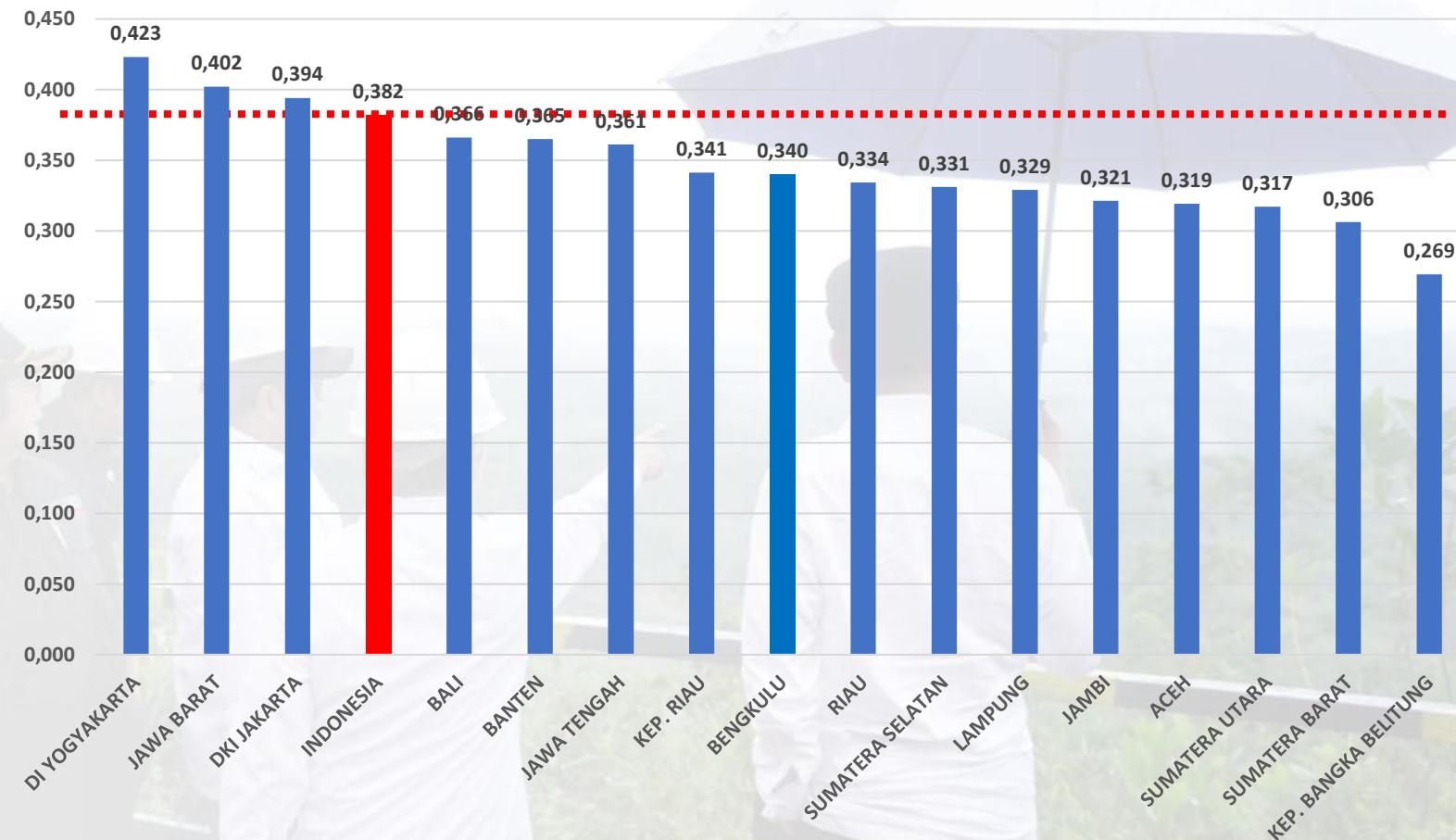


Untuk Provinsi **DKI Jakarta** patut diapresiasi karena memiliki angka **IPM tertinggi** yaitu **80,76%**, sedangkan Provinsi **Lampung** masih perlu peningkatan khususnya di sektor **pendidikan dan kesehatan** karena memiliki nilai **terendah** yaitu **69,57%**.

SUMBER: BPS 2020, DIOLAH



GINI RASIO TAHUN 2019



Provinsi Bangka Belitung memiliki gini rasio terendah yaitu **0,269** (ketimpangan rendah), **DI Yogyakarta, Jawa Barat** dan **DKI Jakarta** memiliki **indeks Gini Rasio 3 tertinggi**, namun masih dalam kategori tingkat ketimpangan sedang.

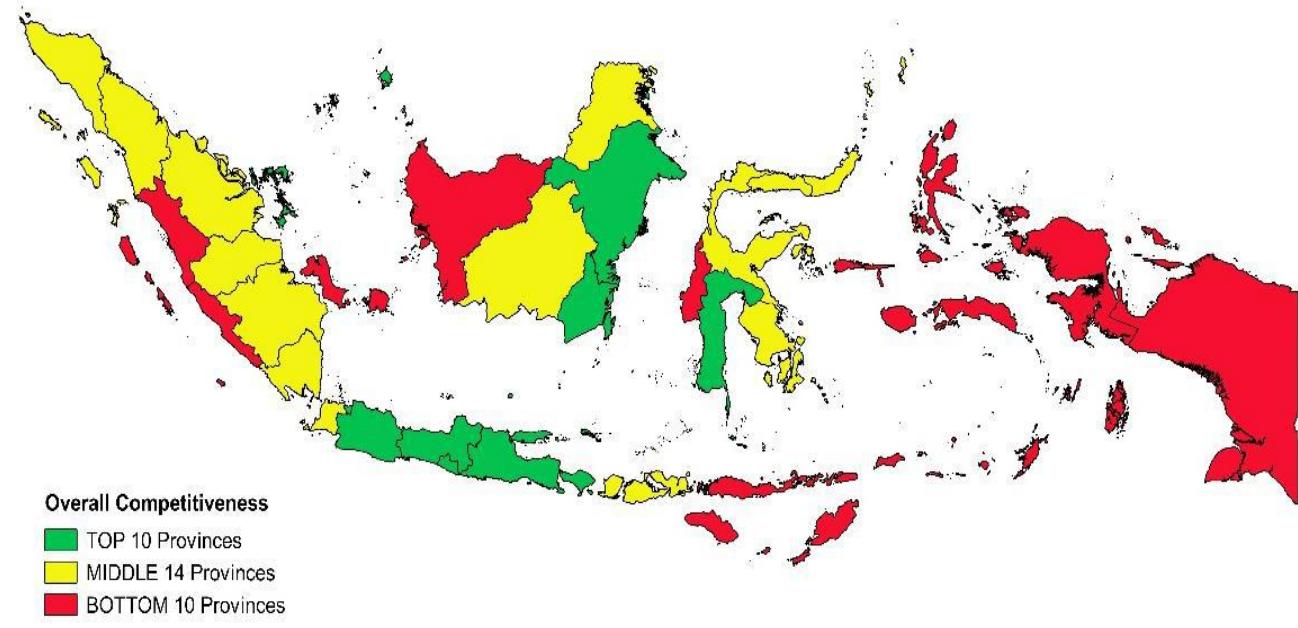


POTENSI FISKAL DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN

INDEKS DAYA SAING DAERAH REGIONAL 2

Ranking Indeks Daya Saing Seluruh Aspek

NO.	PROVINSI	RANKING 2017	RANKING 2018*	SCORE
1.	DKI Jakarta	1	1	3.149
2.	Jawa Barat	3	3	1,548
3.	Jawa Tengah	5	4	1,358
4.	DIY	9	6	0500
5.	Bali	7	8	0.401
6.	Kepulauan Riau	10	9	0,279
7.	Lampung	14	11	0,140
8.	Banten	6	12	0,128
9.	Riau	16	13	0,056
10.	Sumatera Selatan	24	18	-0,024
11.	Sumatera Utara	20	20	-0,301
12.	Aceh	25	22	-0,350
13.	Jambi	18	24	-0,559
14.	Sumatera Barat	15	25	-0,602
15.	Kep. Bangka Belitung	22	26	-0,736
16.	Bengkulu	27	29	-0,921



Berdasarkan survei **Asian Competitiveness Index (ACI)** Tahun 2018, kondisi **daya saing** di antara provinsi-provinsi di Indonesia menurut aspek-aspeknya adalah sbb:

- 1. Stabilitas makro ekonomi:** Tertinggi: DKI Jakarta; Terendah: Bengkulu
- 2. Kelembagaan dan Pemerintahan:** Tertinggi: DKI Jakarta; Terendah: Bengkulu
- 3. SDM, bisnis, dan keuangan:** Tertinggi: DKI Jakarta; Terendah: Aceh
- 4. Kualitas hidup dan pengembangan infrastruktur:** Tertinggi: DI Yogyakarta; Terendah: Kepulauan Bangka Belitung

INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH (IKFD) 2019



NO.	PROVINSI	INDEKS KFD 2019	KATEGORI KFD
1.	DKI Jakarta	11,473	Sangat Tinggi
2.	Jawa Barat	3,171	Sangat Tinggi
3.	Jawa Tengah	1,948	Sangat Tinggi
4.	Banten	1,135	Tinggi
5.	Riau	0,956	Tinggi
6.	Sumatera Utara	0,945	Tinggi
7.	Sumatera Selatan	0,794	Sedang
8.	Bali	0,610	Sedang
9.	Lampung	0,590	Sedang
10.	Aceh	0,529	Sedang
11.	Sumatera Barat	0,455	Sedang
12.	Jambi	0,350	Rendah
13.	Bengkulu	0,319	Rendah
14.	Kepulauan Riau	0,386	Rendah
15.	DI Yogyakarta	0,314	Rendah
16.	Bangka Belitung	0,264	Sangat Rendah

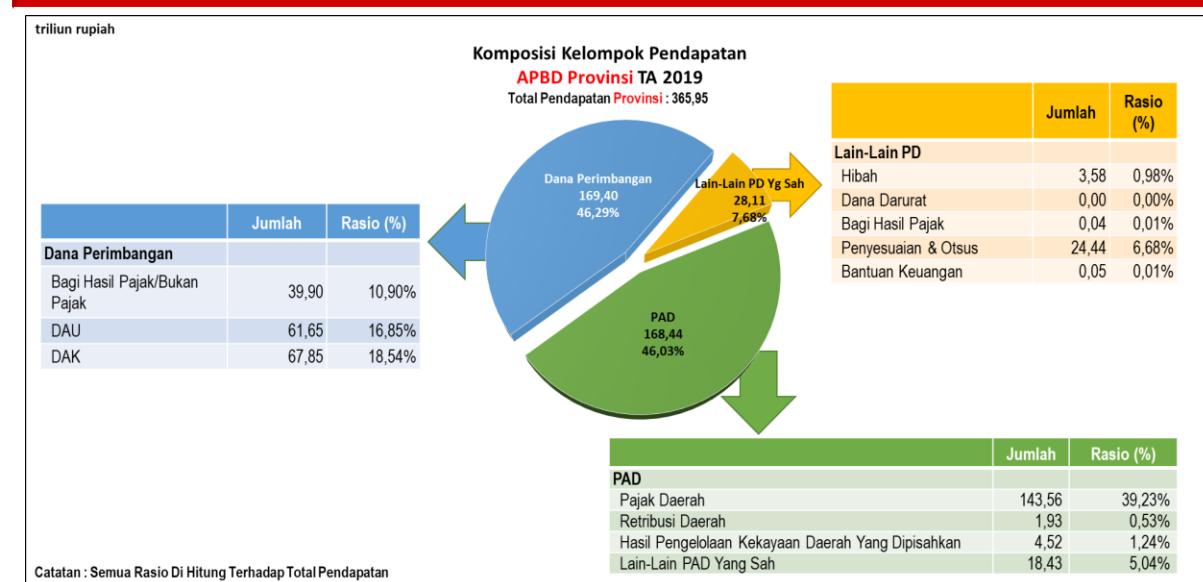
Indeks kapasitas fiskal daerah digunakan untuk mengelompokkan kategori kapasitas fiskal daerah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah, penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah Daerah, dan/atau penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Semakin rendah kapasitas fiskal daerah, maka semakin tinggi ketergantungan daerah terhadap alokasi dari pusat

PROPORSI PENDAPATAN DAN BELANJA PROVINSI DALAM APBD TAHUN 2019

Sumber Data:
KepMen Evaluasi APBD Induk TA 2019, Ditjen Bina Keuangan Daerah

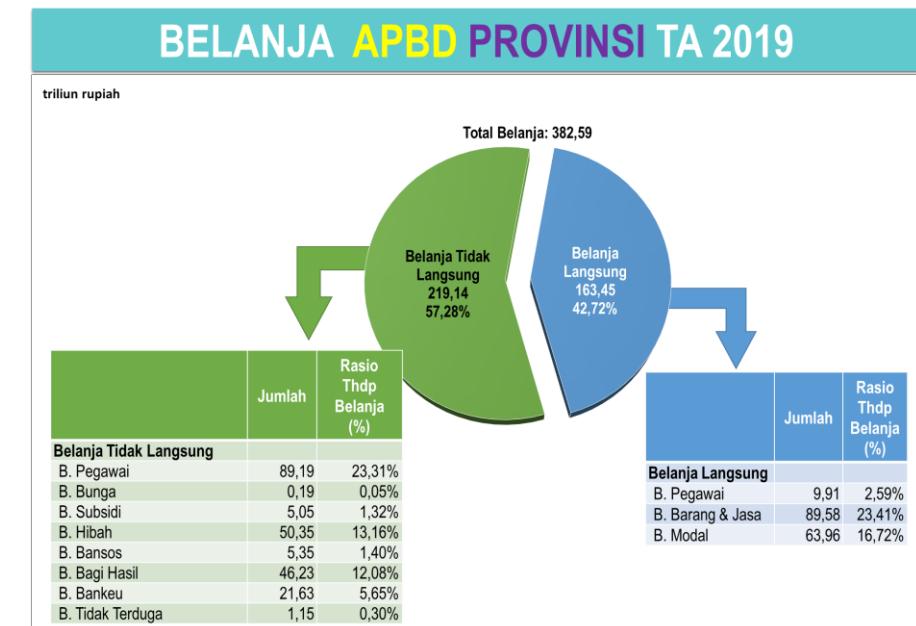


Kontribusi PAD terhadap pendapatan pemerintah provinsi pada Tahun 2019 adalah 46,03%, yang menunjukkan tingkat kemandirian provinsi di Indonesia dikategorikan sedang.



Secara keseluruhan, **belanja tidak langsung** masih **lebih besar** dari **belanja langsung** pada struktur belanja pemerintah provinsi Tahun 2019, sebesar **57,28%**.

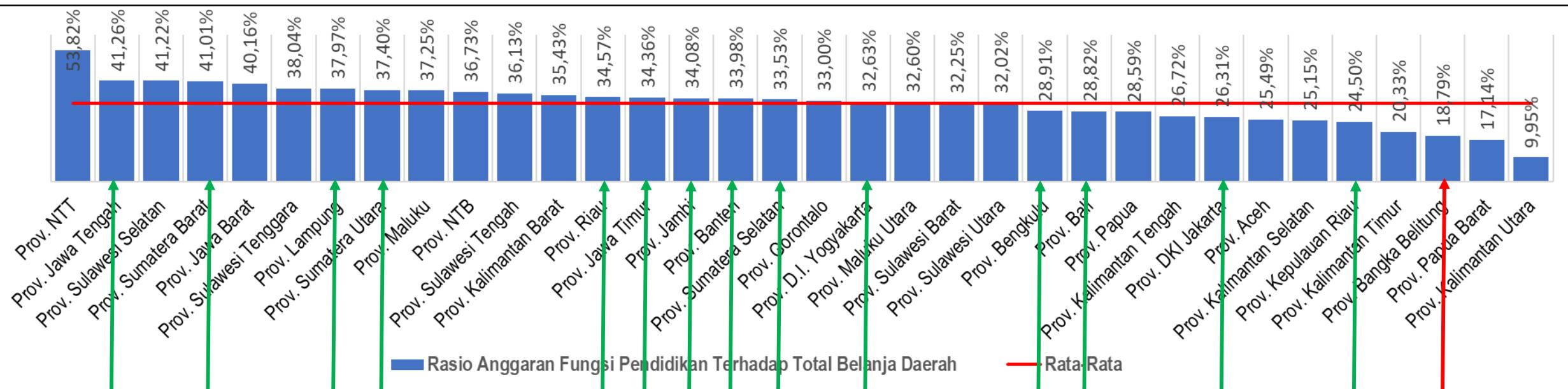
Pada **tahun 2021**, **belanja daerah diimbau agar diarahkan** untuk nantinya memiliki **manfaat** dan **dampak langsung** kepada **masyarakat**.



EVALUASI ALOKASI DANA PENDIDIKAN DALAM APBD 2019 REGIONAL 2



“UU 20/2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional (Ps. 49 Ay. 1) : Dana Pendidikan gaji pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD”

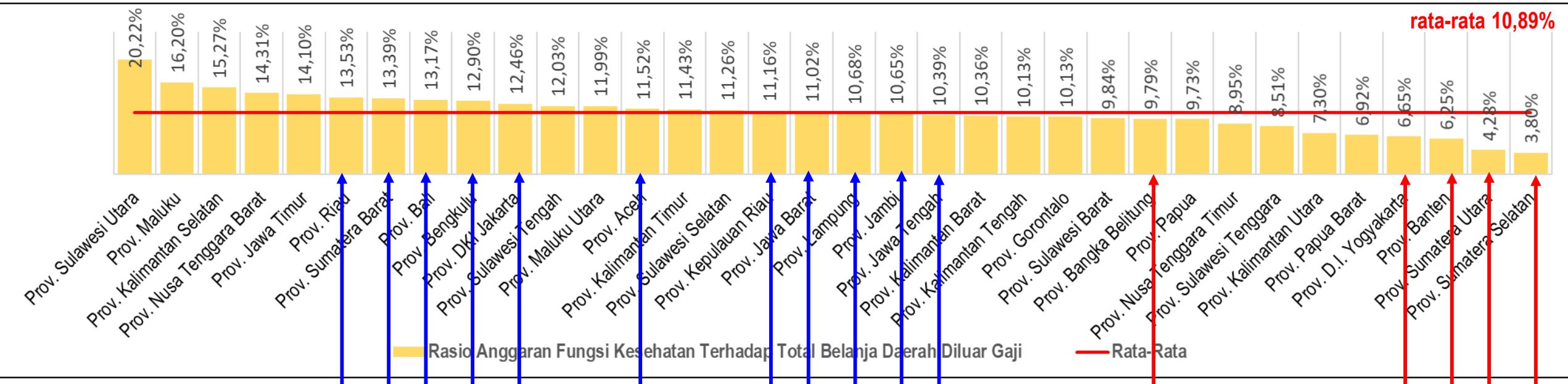


Provinsi Jawa Tengah memiliki proporsi anggaran Pendidikan tertinggi dari APBD-nya di Regional 2. Namun, untuk Provinsi Bangka Belitung masih di bawah 20%, hal ini tentunya perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah terkait agar minimal mampu dianggarkan sebesar 20% APBD.

EVALUASI ALOKASI DANA KESEHATAN DALAM APBD 2019 REGIONAL 2



“UU 36/2009 ttg Kesehatan (Ps. 171 Ay. 2) : Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD di luar gaji.”



Untuk daerah regional 2, masih terdapat **5 (lima) daerah** yang masih **di bawah 10%** yaitu, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Diharapkan untuk **penganggaran di tahun berikutnya** dapat segera **ditingkatkan agar mampu di atas 10%**.



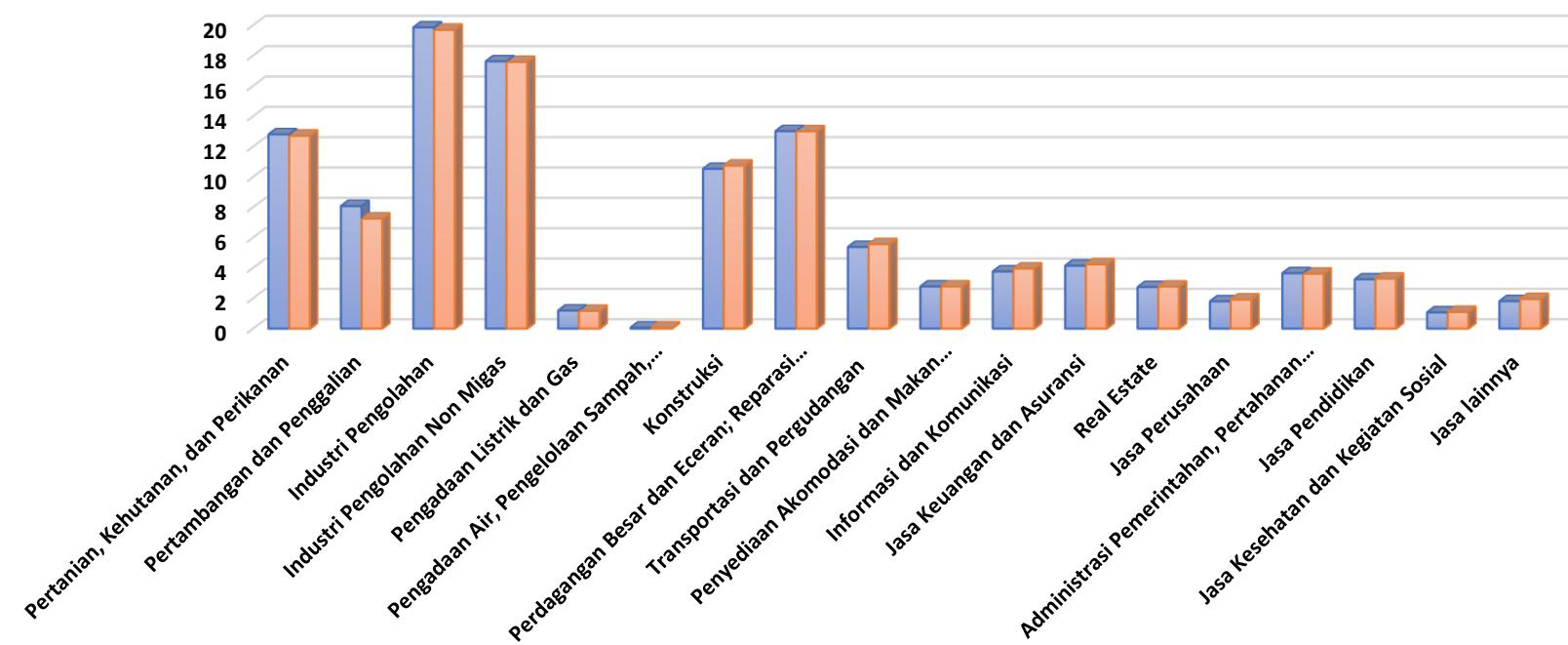
POTENSI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

KONTRIBUSI PDB PER SEKTOR USAHA DI INDONESIA

TAHUN 2018-2019

Distribusi PDB Atas Dasar Harga Berlaku per Sektor Usaha (Persen)	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,81	12,72
Pertambangan dan Penggalian	8,08	7,26
Industri Pengolahan	19,86	19,7
Industri Pengolahan Non Migas	17,62	17,58
Pengadaan Listrik dan Gas	1,19	1,17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07
Konstruksi	10,53	10,75
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,02	13,01
Transportasi dan Pergudangan	5,38	5,57
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,78	2,78
Informasi dan Komunikasi	3,77	3,96
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,15	4,24
Real Estate	2,74	2,77
Jasa Perusahaan	1,8	1,92
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,65	3,62
Jasa Pendidikan	3,25	3,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,1
Jasa lainnya	1,81	1,95

Percentase PDB per Sektor Usaha Tahun 2018-2019

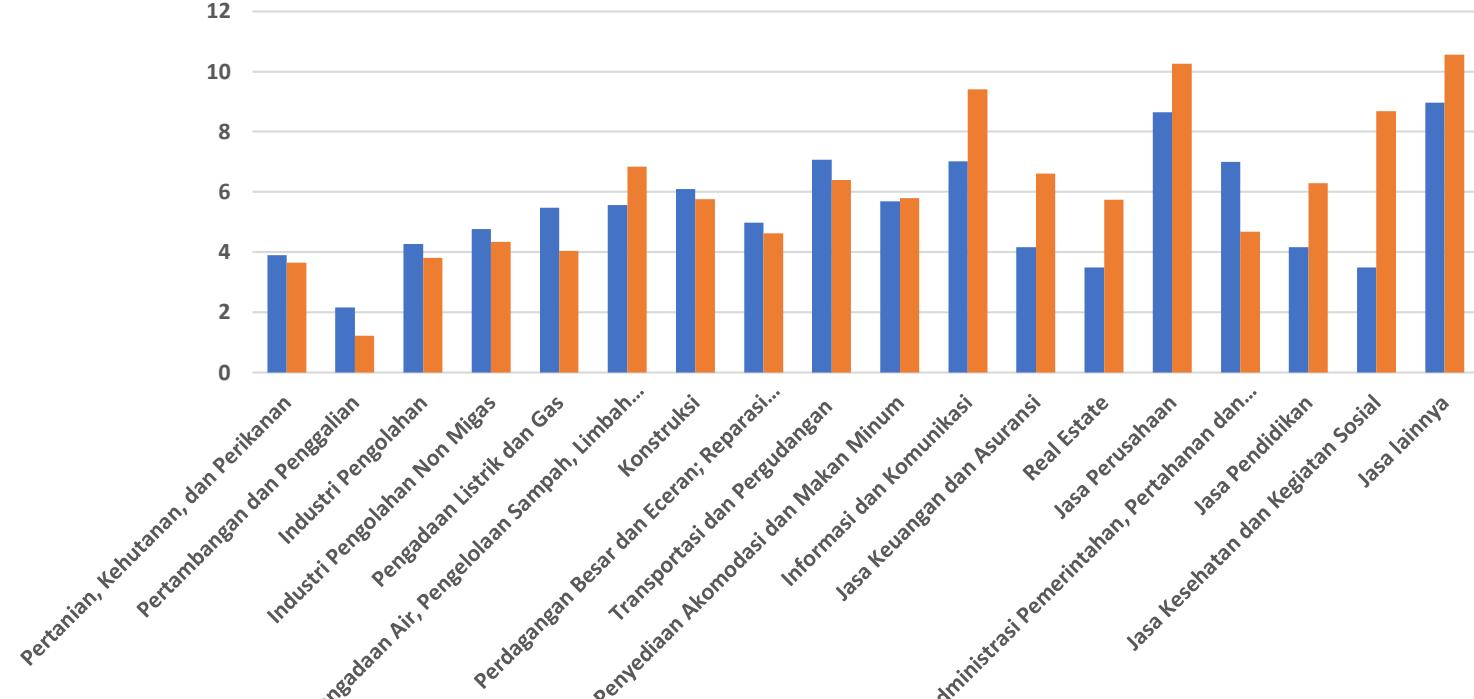


Indonesia memiliki seluruh potensi dalam upaya peningkatan perekonomian, 3 sektor yang memberi kontribusi terbesar:

1. **Industri Pengolahan**
2. **Industri Pengolahan Non Migas**
3. **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**

LAJU PERTUMBUHAN PDB PER SEKTOR USAHA TAHUN 2018-2019

Laju Pertumbuhan Kumulatif PDB Per Sektor Usaha (persen)	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,89	3,64
Pertambangan dan Penggalian	2,16	1,22
Industri Pengolahan	4,27	3,8
Industri Pengolahan Non Migas	4,77	4,34
Pengadaan Listrik dan Gas	5,47	4,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,56	6,83
Konstruksi	6,09	5,76
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,97	4,62
Transportasi dan Pergudangan	7,06	6,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,68	5,8
Informasi dan Komunikasi	7,02	9,41
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,17	6,6
Real Estate	3,48	5,74
Jasa Perusahaan	8,64	10,25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7	4,67
Jasa Pendidikan	4,17	6,29
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,48	8,68
Jasa lainnya	8,97	10,55

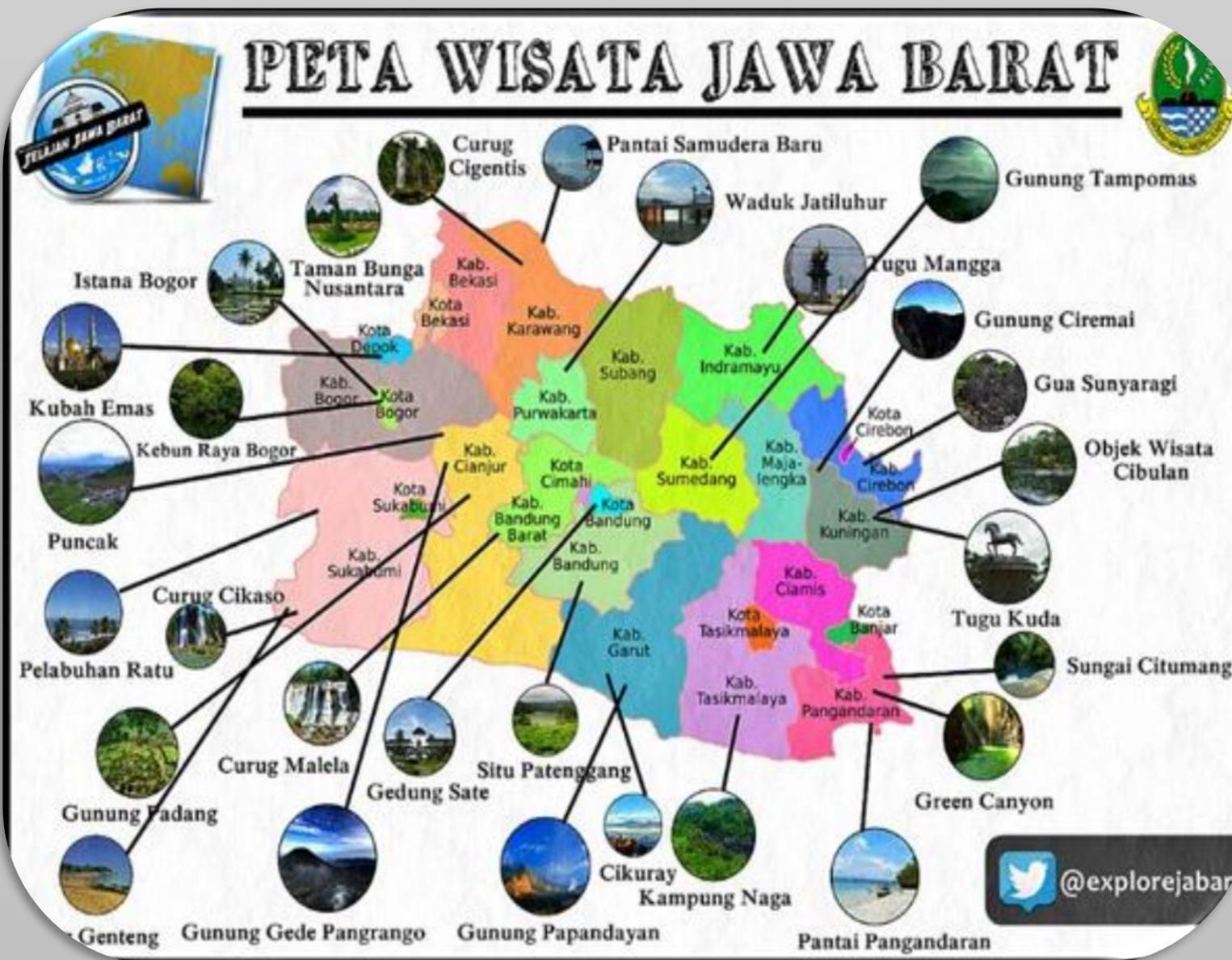


Laju Pertumbuhan Sektor Usaha Tertinggi: Jasa Lainnya (10,55%)
Laju Pertumbuhan Sektor Usaha Terendah: Pertambangan dan Penggalian (1,22%)

Peningkatan pertumbuhan tertinggi: Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (5,2%)

Penurunan pertumbuhan terendah: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (-2,33%)

POTENSI PARIWISATA JAWA BARAT



Jenis wisata di Jawa Barat:

- Wisata sejarah
- Wisata budaya
- Wisata alam (gunung)
- Wisata pantai & bahari
- Wisata perbelanjaan
- Wisata edukasi
- Wisata permainan keluarga, dll.

Wisata Kuliner:

- Seblak
- Nasi Timbel
- Karedok
- Mie Kocok
- Surabi
- Peuyeum
- Tahu Sumedang
- Nasi Jamblang
- Tapai ketan
- Dodol garut
- Tahu gejrot
- Dll.

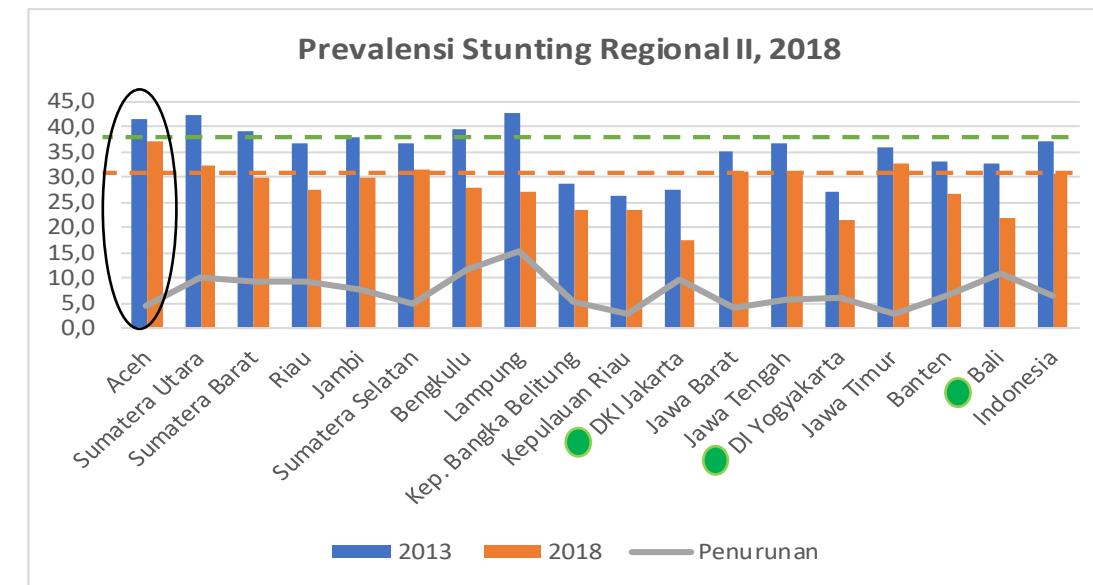
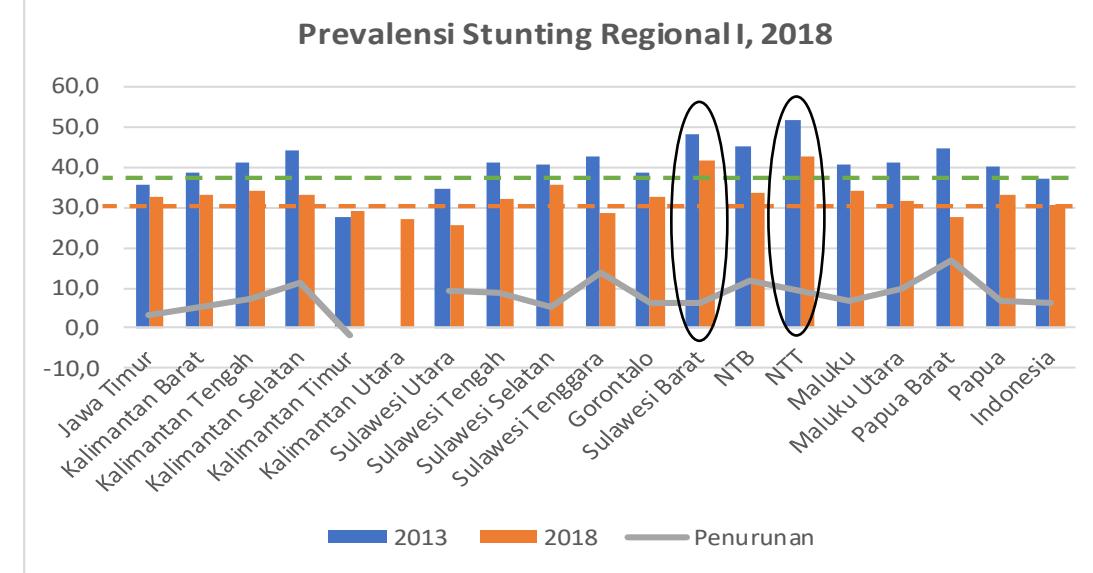




FAKTA STUNTING DI INDONESIA



- *Stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak*
→ Hal itu bisa terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan
- *Prevalensi Stunting Indonesia 2018 = 30,8 % (1 dari 3 bayi Baduta atau 9 juta anak menderita stunting).*
- *Regional I memiliki Jumlah Provinsi dengan Prevalensi Stunting di atas nasional lebih banyak dibandingkan Regional II.*
- *Provinsi dengan Prevalensi Stunting Tertinggi: NTT & Sulbar (Regional I), Aceh (Regional II).*
- *Provinsi dengan Prevalensi Stunting Terendah: DKI Jakarta, DIY, Bali (Regional II)*
- *Target Nasional Prevalensi Stunting 2024 = 14,0 % (RPJMN 2020-2024) dan stunting telah masuk dalam Major Project*
- *Kerugian ekonomi akibat stunting: 2-3% dari PDB atau sekitar Rp 300 triliun (PDB Indonesia 2017 sebesar Rp 13.000 triliun).*



Sumber: Riskeidas, 2018



ARAHAH PRESIDEN RI

Untuk Percepat Perda RDTR

(Rencana Detail Tata Ruang)

semua jajaran harus

“melakukan terobosan”

dan keluar dari hal yang linier dan bersifat rutinitas.

- 1. Pemerintah daerah agar segera menetapkan RDTR sebagai payung hukum penting dan dasar pelaksanaan percepatan infrastruktur nasional.**
- 2. Memberikan kemudahan perizinan berusaha dengan tetap mematuhi fungsi lahan atau zona dalam Perda RDTR.**

sejalan



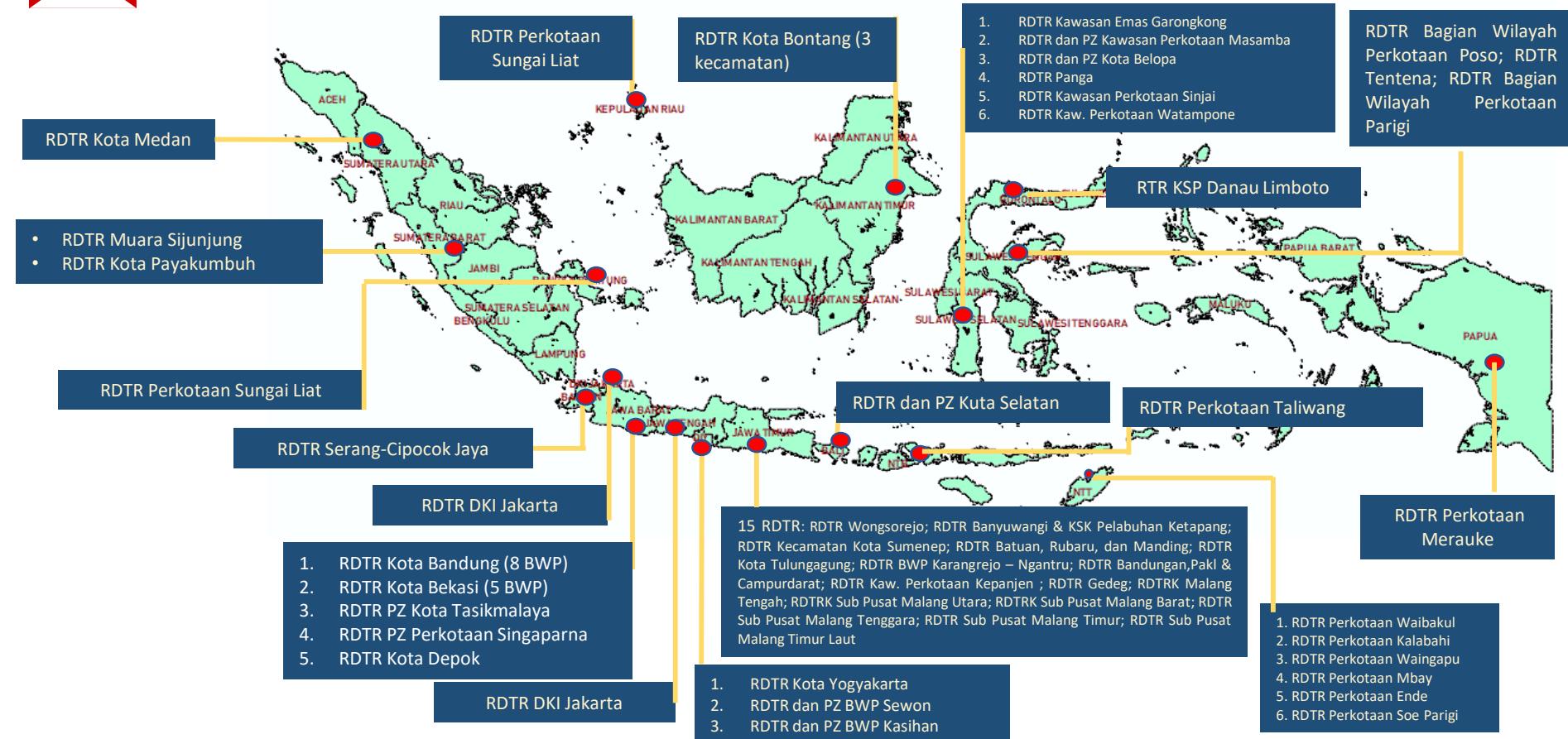
UU NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

“Pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, di tingkat pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan”

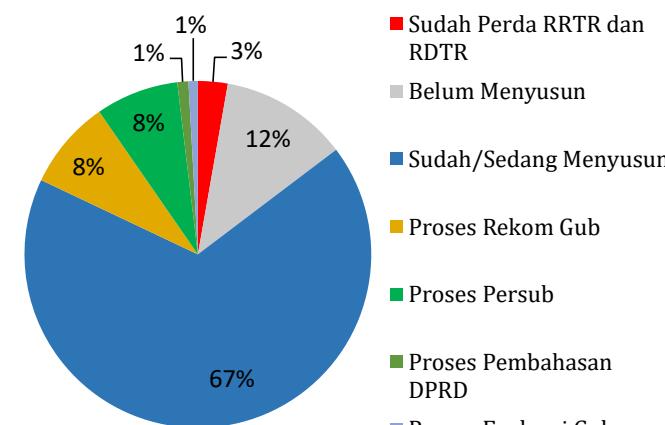


SEBARAN 52 PERDA RDTR SECARA NASIONAL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



52 PERDA RDTR SE-INDONESIA



NO	PROGRES RRTR DAN RDTR SELURUH INDONESIA	
1	Sudah RDTR	52
2	Belum Menyusun	219
3	Sudah/Sedang Menyusun	1238
4	Proses Rekom Gub	153
5	Proses Persub	142
6	Proses Pembahasan DPRD	19
7	Proses Evaluasi Gubernur	15
	Total RRTR dan RDTR	1838

1. Total RDTR yang harus disusun se-Indonesia sebanyak 1.838 RDTR. Saat ini baru terdapat 52 RDTR (3% dari Total RDTR yang harus disusun).
2. Perlu dialokasikan dalam APBD untuk penetapan Perda RDTR sebagai landasan instrumen pemberian perizinan investasi diseluruh wilayah Indonesia

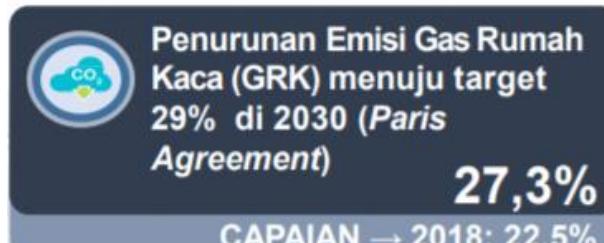
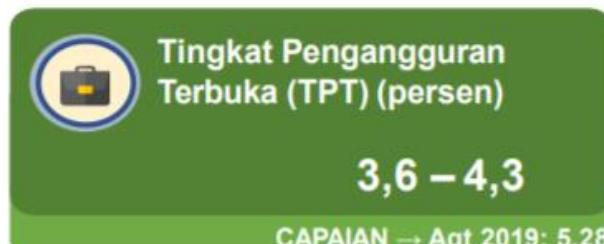
Sumber: Inventaris Ditjen Bina Bangda, 2019.



KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020



SASARAN PEMBANGUNAN 2020-2024



7 AGENDA PEMBANGUNAN

- | | |
|--|---|
|  1 | Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan |
|  2 | Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan |
|  3 | SDM Berkualitas dan Berdaya Saing |
|  4 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan |
|  5 | Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar |
|  6 | Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim |
|  7 | Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik |

Sudah merupakan suatu **kewajiban** nantinya bagi **pemerintah daerah** untuk mampu **mendukung** pencapaian **target RPJMN**. Dukungan pemerintah daerah tentunya nantinya akan **dilakukan melalui pembangunan daerah** yang berbasis **urusan** namun tetap memperhatikan **sinergitas antarsektor**.

IBU KOTA BARU INDONESIA

di KALIMANTAN TIMUR

Presiden Joko Widodo
Umumkan Ibu Kota Baru RI
di Istana Kepresidenan
Senin, 26 Agustus 2019



LOKASI

- Sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara

ALASAN

- Risiko Bencana Minimal
- Lokasi Strategis di Tengah Indonesia
- Dekat dengan Kota Berkembang: Balikpapan & Samarinda
- Infrastruktur Lengkap
- Tersedia Lahan Negara 158 Ribu Hektare

BIAYA PEMINDAHAN

- Total Rp 466 Triliun
- 19% dari APBN dengan Skema Kerja Sama Pengelolaan Aset
- Sisanya dari Kerja Sama Pemerintah & Badan Usaha
- Investasi Langsung Swasta dengan BUMN

STATUS JAKARTA

- Pusat Bisnis Skala Regional & Global
- Pusat Keuangan & Perdagangan
- Bagian dari Prioritas Pembangunan

Pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan diharapkan dapat memberikan manfaat yang luarbiasa, antara lain adalah:

1. Memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI

2. Mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia untuk pemerataan wilayah

- Estimasi peningkatan Real GDP Nasional sebesar 0,1% - 0,2% dan Output Multiplier 2,3;
- Peningkatan Kesempatan Kerja (Employment Multiplier 2,9);
- Penurunan Kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Kenaikan Price of capital 0,23% dan Kenaikan Price of Labour 1,37%)

3. Mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris ke Indonesia-sentris

4. Ketersediaan lahan yang luas dapat membangun ibu kota baru dengan kawasan hijau yang lebih dominan dari wilayah terbangun

5. Mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek.



PERHATIAN TERHADAP PENYELENGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

PILKADA SERENTAK 2020 23 SEPTEMBER

9
PROVINSI
GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR

224
KABUPATEN
BUPATI DAN
WAKIL BUPATI

37
KOTA
WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

*SULAWESI SELATAN

KEPULAUAN RIAU

SUMATERA BARAT

BENGKULU

JAMBI

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN UTARA

KALIMANTAN SELATAN

SULAWESI TENGAH

SULAWESI UTARA



DAERAH PILKADA SERENTAK 2020 23 SEPTEMBER

KAMPANYE MELALUI MEDIA MASSA,
CETAK DAN ELEKTRONIK DILAKUKAN
6 SEPTEMBER 2020.

MASA TENANG DAN
PENGEMBANGAN ALAT PERAGA
20-22 SEPTEMBER 2020

PEMUNGUTAN SUARA
23 SEPTEMBER 2020

PROVINSI

SUMATERA BARAT

JAMBI

BENGKULU

KEPULAUAN RIAU

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN UTARA

SULAWESI UTARA

SULAWESI TENGAH

9 PROVINSI, 224 KABUPATEN, 37 KOTA

KOTA

MEDAN

BINJAI

SIBOLGA

TANJUNG BALAI

GUNUNG SITOLI

PEMATANGSIANTAR

SOLOK

BUKITTINGGI

DUMAI

SUNGAI PENUH

METRO

BANDAR LAMPUNG

BATAM

DEPOK

PEKALONGAN

SEMARANG

MAGELANG

SURAKARTA

BLITAR

SURABAYA

PASURUAN

CILEGON

TANGERANG SELATAN

DENPASAR

MATARAM

BANJARBARU

BANJARMASIN

SAMARINDA

BALIKPAPAN

BONTANG

BITUNG

MANADO

TOMOHON

PALU

MAKASSAR (PILKADA
ULANG TAHUN 2018)

TERNATE

TIDORE KEPULAUAN

MEMBANGUN PERSPEKTIF PERDAMAIAIN MENGHADAPI PILKADA 2020



Daftar Pemilih Motif Politik Uang



Isu-isu Hoax Dan SARA



Kesadaran Demokrasi



Langkah Preventif



Kampanye Hitam

Politik Identitas Memenangi Kursi PILKADA



ARAH KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2020

Untuk lebih **mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa** yang semakin **fokus** pada upaya untuk **mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar** antardesa, **memajukan perekonomian** desa, serta meningkatkan **kualitas hidup** masyarakat desa, maka **arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2020** ditujukan untuk:

1. **Menyempurnakan kebijakan pengalokasian**, dengan tetap:
 - memperhatikan pemerataan dan keadilan;
 - memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta kemiskinan; dan
 - memperhatikan kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa;
2. Meningkatkan porsi **penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa** dan **pengembangan potensi ekonomi desa**;
3. **Memperbaiki pengelolaan Dana Desa** melalui pelatihan dan pembinaan aparatur desa, peningkatan kompetensi tenaga pendamping, dan penguatan sistem pengawasan;
4. **Meningkatkan kapasitas aparatur** dan **kelembagaan desa**, serta **tenaga pendamping**;
5. **Mengoptimalkan peran pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota** dalam pengelolaan Dana Desa;
6. **Meningkatkan akuntabilitas** dan **kinerja pelaksanaan Dana Desa** melalui **penyaluran berdasarkan kinerja** dan **pemberian insentif** atas kinerja penyaluran.



PENUTUP



Tindak Lanjut Rakortekrenbang

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh Pemerintah Daerah



Target Pembangunan Nasional

Fokus pada kontribusi tiap-tiap daerah untuk pencapaian target pembangunan nasional dalam rangka mendukung kinerja Presiden.

Kualitas Hasil (Outcome)

Fokus pada kualitas hasil (outcome) pembangunan daerah melalui sinkronisasi pembangunan, serta penguatan dalam pengendalian dan evaluasinya.

Konsistensi

Konsisten mengawal hasil rakortekrenbang dalam musrenbang provinsi dan nasional, serta dalam dokumen perencanaan dan penganggarannya (RKPD dan APBD)

Fungsi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD dalam upaya sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah yang saling terhubung dengan sistem informasi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ada.

Kolaborasi dan Inovasi

Kembangkan kolaborasi dan inovasi, serta keterlibatan masyarakat dan stakeholders lainnya



Arahan Penyusunan RKPD 2021

- **Memperhatikan dan melakukan sinkronisasi serta berkontribusi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN, Rancangan RKP 2021 dan Perda RPJMD yang berlaku.**
- **Mengoptimalkan pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada Bulan Maret Tahun 2020 yang bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mencapai target pembangunan Nasional.**
- **Penyusunan RKPD Tahun 2021 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.**
- **Penyusunan RKPD menggunakan SIPD yang saling terhubung dengan sistem informasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memperhatikan program serta kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah.**



TERIMAKASIH